

***THE EFFECT OF MINIMUM WAGE, GDP, INFLATION, OPENNESS,
INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON LABOR ABSORPTION
IN INDONESIA 1995-2023***

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PDB, INFLASI, KETERBUKAAN, INVESTASI
DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 1995 -2023**

Rhegita Surya Febiaranti¹, Yuni Prihadi Utomo²
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}
b300210115@student.ums.ac.id¹, yp196@ums.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the direction and magnitude of the influence of minimum wages, gross domestic product, inflation, openness, investment and government spending on labor absorption in Indonesia during the period 1995-2023. The data analysis technique used is PAM (Partial Adjustment Model) research using time series data. The results of the study show that minimum wages and openness have a positive effect on labor absorption in Indonesia. Meanwhile, gross domestic product, inflation, investment and government spending have a negative effect on labor absorption in Indonesia. High minimum wages increase costs for employers, which can encourage them to reduce their workforce. An increase in GDP can encourage increased employment because companies will need more workers to meet increased demand. When inflation rises, people's purchasing power decreases, which encourages companies to reduce spending, including hiring workers. Economic openness increases investment and exports, thus encouraging business growth and the need for workers. If investment is directed at capital-intensive sectors, it can reduce labor absorption. If government spending is focused on labor-intensive sectors than capital-intensive sectors, labor absorption will decrease.

Keywords: Labor, Minimum Wages, GDP, Inflation, Openness, Investment, Government Spending

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh upah minimum, produk domestik bruto, inflasi, keterbukaan, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama kurun waktu 1995-2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis PAM (Partial Adjustment Model) dengan menggunakan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan keterbukaan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sementara itu, produk domestik bruto, inflasi, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Upah minimum yang tinggi meningkatkan biaya bagi pengusaha sehingga dapat mendorong mereka untuk mengurangi tenaga kerja. Peningkatan PDB dapat mendorong peningkatan lapangan kerja karena perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Ketika inflasi naik, daya beli masyarakat menurun yang mendorong perusahaan menekan pengeluaran termasuk perekrutan tenaga kerja. Keterbukaan ekonomi meningkatkan investasi dan ekspor, sehingga mendorong pertumbuhan usaha dan kebutuhan tenaga kerja. Jika investasi diarahkan pada sektor padat modal dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Jika pengeluaran pemerintah difokuskan pada sektor padat karya daripada padat modal maka penyerapan tenaga kerja berkurang.

Kata Kunci: Tenaga kerja, Upah Minimum, PDB, Inflasi, Keterbukaan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Rmdani et al., 2021). Tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan

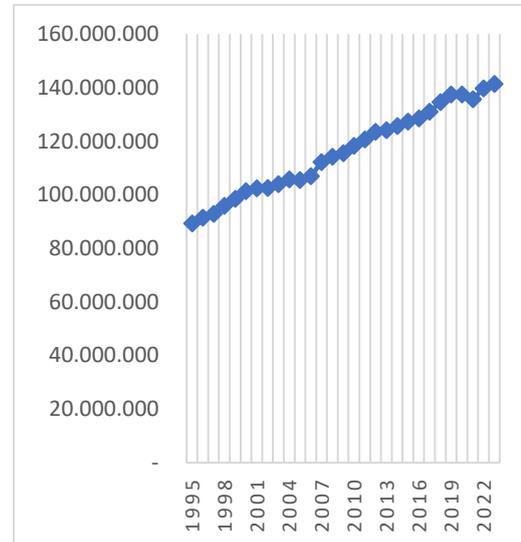
kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut *ceteris paribus*, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan disertai pengangguran. Oleh

karena itu diperlukan perluasan tenaga kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kepasar tenaga kerja. Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, (Indradewa & Natha, 2015).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh negara dari waktu ke waktu. Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah salah satu dari banyaknya negara yang mengalami masalah mengenai tenaga kerja. Masalah pengangguran muncul sebagai sebab dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang tersedia. Mengingat kesempatan kerja yang terbatas tersebut maka pemerintah mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat menampung maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berada ditengah masyarakat melalui penciptaan usaha usaha industri kecil (Pratiwi & Indrajaya, 2019). Tersedianya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan terserapnya tenaga kerja, yang diikuti adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi (Ardiawan & Utama, 2024). Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja dan terciptanya penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran.

Kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode tahun 1995-2023 yang cenderung berfluktuasi naik turun dari tahun ke tahun menjadi ketertarikan

tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Grafik 1 memperlihatkan perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada kurun waktu 1995-2023.



Gambar 1. Grafik Jumlah tenaga kerja indonesia tahun 1995-2023

Sumber: World Bank, diolah

Dari Grafik 1 dapat dilihat selama periode tahun 1995–2023 terdapat peningkatan dan penurunan yang tidak besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 1995 – 2005 terlihat penyerapan tenaga kerja tidak terjadi banyak perubahan pada angkanya, kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2006 – 2023 yang semula pada tahun 2006 sebanyak 106.146.819 jiwa pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 140.931.083 jiwa, pada 2023 menjadi puncak peningkatan tenaga kerja tertinggi selama 28 tahun terakhir yang sebelumnya pada tahun 2021 mengalami penurunan angka penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibutuhkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan juga mengurangi angka

pengangguran yang relatif masih tinggi.

Keynes berpendapat bahwa pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja tergantung pada tingkat permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika permintaan agregat tinggi, perusahaan akan meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, ketika permintaan agregat rendah, perusahaan akan mengurangi produksi dan pengangguran akan meningkat. Dalam pandangannya, pengangguran bisa terjadi meskipun ada tenaga kerja yang tersedia, karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar (Mankiw, 2016) Dalam temuannya cara untuk mengurangi pengangguran dapat dilakukan dengan memperbanyak investasi seperti mesin, karena mesin membutuhkan operator sehingga secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan baru. Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan (Iksan et al., 2020).

Kurva Phillips, yang merupakan temuan A. W. Philips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, bahwa ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah dan dengan begitu terserapnya tenaga kerja ikut tinggi. Namun, dalam pandangan jangka panjang, teori ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan permanen antara pengangguran dan inflasi. Ekonomi akan bergerak menuju tingkat pengangguran alami, dan inflasi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat, bukan hanya oleh pengangguran itu sendiri (Hasanah, 2021).

Pada teori *Human Capital*, Bassanini dan Venn mengkaji peran *human capital* terhadap penyerapan tenaga kerja dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka

berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih baik dapat mempercepat transisi pekerja ke sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pendidikan seseorang, semakin besar peluang mereka untuk diserap di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Bassanini, A., & Venn, 2016).

Teori Malthus, menjelaskan bagaimana pertumbuhan populasi yang cepat tanpa peningkatan lapangan pekerjaan dapat memperburuk ketidaksetaraan dan pengangguran. Meskipun pertumbuhan populasi dapat menciptakan lebih banyak peluang tenaga kerja, ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pekerjaan yang tercipta dapat mengarah pada pengangguran atau ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja, tanpa kontrol terhadap pertumbuhan penduduk, masyarakat akan terus mengalami tekanan ekonomi yang menghambat pembangunan dan penyerapan tenaga kerja secara optimal (Rodrik, 2018).

Dalam teori Penawaran Tenaga Kerja (*Labor Supply Theory*), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah dan karakteristik tenaga kerja yang tersedia, faktor seperti pendidikan, keterampilan, serta insentif ekonomi dan sosial mempengaruhi partisipasi tenaga kerja di pasar kerja. Individu yang memiliki keterampilan tinggi dan pendidikan lanjutan cenderung lebih mudah memasuki sektor pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, individu dengan keterampilan rendah atau tidak memiliki pendidikan yang memadai mungkin kesulitan untuk diserap dalam pasar kerja yang semakin mengutamakan keterampilan teknis dan pendidikan tinggi. Teori ini menekankan bahwa keputusan tenaga kerja tidak

hanya bergantung pada faktor ekonomi seperti upah, tetapi juga faktor sosial dan preferensi individu. Perubahan dalam kebijakan tenaga kerja, seperti subsidi pendidikan atau insentif pajak, dapat mempengaruhi keputusan individu untuk memasuki atau meninggalkan pasar kerja (Borjas, 2015).

Teori Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja yang fleksibel akan lebih mudah menyerap tenaga kerja karena tidak terhambat oleh regulasi ketat seperti upah minimum, perlindungan tenaga kerja yang berlebihan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang membatasi fleksibilitas perusahaan dalam merekrut dan memberhentikan tenaga kerja (Freeman, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengamati pengaruh upah minimum, PDB, inflasi, keterbukaan, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 1995 – 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Meilawati & Indira (2023), di Provinsi Bali pada tahun 2017 – 2021, dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa variabel Investasi dan Upah Minimum Kabupaten tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan signifikansi empirik t 0.3993 ($> 0,10$) dan 0.2424 ($> 0,10$).

Pada tahun 2002 – 2022 di Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan analisis metode (OLS) *Ordinary Least Square*, Afrizal, (2024), menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh terhadap Tenaga Kerja dengan masing-masing koefisien regresi 0,622134 dan -0,586833 dengan signifikansi empirik t

0,0009 ($< 0,01$) dan 0,0017 ($< 0,01$) Sementara Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan signifikansi empirik t 0,4874 ($> 0,10$).

Di pulau Jawa pada tahun 2014 – 2020, dengan menggunakan analisis regresi data panel, dengan model terpilih FEM, Sari & Khaerunisa (2023), menemukan bahwa, Upah minimum dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 2335, 719 dan -0,013886 dengan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,05$) dan 0,0000 ($< 0,05$). Dengan menggunakan analisis data panel dengan model terpilih FEM, Hafiludin & Zuhroh (2024), di kawasan ASEAN pada tahun 2014 – 2021, menemukan bahwa upah, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan masing-masing koefisien regresi -0,388638, 0,151022 dan 0,149685 sedangkan signifikansi empirik t 0,0006 ($< 0,01$), 0,0005 ($< 0,01$) dan 0,0000 ($< 0,01$).

Taufan & Mafruhah (2022), di Jawa Barat pada tahun 2009 – 2021, dengan menggunakan metode analisis OLS (*Ordinary Least Square*), menemukan bahwa secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dengan koefisien regresi masing - masing 1.044990, 2.894474 dan 6.856705 sedangkan signifikansi empirik t sebesar 0.0128 (< 0.05), 0.0236 (< 0.05) dan 0.0012 (< 0.05). Di Sumatra pada tahun 2008 – 2017, dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih ARDL, Pratama *et al.* (2020), menemukan bahwa upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

dengan koefisien regresi 20.323 dan 0.387 dan signifikansi empirik t 0,276 ($< 0,01$) dan 0,000 ($< 0,01$).

Pada tahun 2014 – 2019, Purnomo, (2021), di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 0,0831 dan signifikansi empirik t 0,0245 ($< 0,05$) sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan signifikansi empirik t 0.8753 ($> 0,10$). Dengan menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS) tahun 2009 – 2019, di provinsi Kalimantan Timur, Listiyono & Wijaya (2021), menemukan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan masing-masing koefisien regresi 0.051 dan 0.067, signifikansi empirik t 0.841 ($> 0,10$) dan 0.841 ($> 0,10$).

Jamaliah (2016), di provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan data panel, menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 0.388 dan signifikansi empirik t 0.001 ($< 0,05$). Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) pada tahun 2010 - 2019, Suwardi *et al.* (2021), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 0.693 dan signifikansi empirik t 0,003 ($< 0,01$).

Sahrul *et al.* (2023), di Indonesia pada tahun 1993 – 2022, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model ECM, menemukan bahwa variabel keterbukaan ekonomi secara bersama sama berpengaruh terhadap tenaga kerja dengan koefisien regresi 0.072260 dan

signifikansi empirik t 0.000000 ($< 0,05$). Pada tahun 2008 – 2013 di Jawa Timur, dengan menggunakan metode Data Panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), Wilis, (2016), menemukan bahwa Upah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi -0,017 dan 9,6710 dengan signifikansi 0,011 ($< 0,05$) dan 0,002 ($< 0,05$) sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 1,1210 dan signifikansi empirik t 0,142 ($> 0,10$).

Di Indonesia pada tahun 2018 – 2022, dengan menggunakan metode analisis Data Panel, Ardiawan & Utama (2024), menemukan bahwa inflasi dan upah minimum bersama sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 0,204 dan 2,291 dengan signifikansi empirik t 0,000 ($< 0,01$) dan 0,003 ($< 0,01$). Sholikhah & Utomo, (2023), di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2002 – 2020, dengan menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien regresi 0,111301 dan signifikansi empirik t 0,0543 ($< 0,10$) sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga dengan signifikansi empirik t 0,4253 ($> 0,10$). Dengan menggunakan metode analisis Data Panel, di Indonesia pada tahun 2013 – 2017 Iksan *et al.*, (2020), menemukan bahwa upah minimum dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan masing-masing koefisien regresi 0.169971 dan -0,004752 dengan signifikansi empirik t 0,0013 ($< 0,05$) dan 0,0857 ($< 0,05$).

METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi *Partial Adjustment Model* (PAM). dengan model ekonometrik jangka panjangnya sebagai berikut:

$$EMP_t^* = \beta_0 + \beta_1 \ln(WAGE) + \beta_2 \ln(PDB) + \beta_3 \ln(INF) + \beta_4 \ln(OPEN) + \beta_5 \ln(INV) + \beta_6 \ln(GOV) + \varepsilon_t$$

di mana:

EMP = Tenaga Kerja (%)

WAGE = Upah Minimum (US \$)

PDB = Produk Domestik Bruto (US \$)

INF = Inflasi (%)

OPEN = Keterbukaan (%)

INV = Investasi Asing (%)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (US \$)

ε = Error term (faktor kesalahan) jangka panjang

β_0 = Konstanta jangka panjang

$\beta_1 \dots \beta_6$ = Koefisien regresi jangka panjang

T = Tahun ke t

Melalui proses substitusi, pengaturan dan parameterisasi perilaku penyesuaian persial (*Partial Adjustment Model*) yang dinyatakan dalam persamaan;

$$(EMP_t - EMP_{t-1}) = \delta(EMP_t^* - EMP_{t-1})$$

Diperoleh model jangka pendek atau model estimasi PAM sebagai berikut:

$$EMP_t = a_0 + a_1 \ln(WAGE_t) + a_2 \ln(PDB_t) + a_3 \ln(INF_t) + a_4 \ln(OPEN_t) + a_5 \ln(INV_t) + a_6 \ln(GOV_t) + \lambda EMP_{t-1} + \nu_t$$

Dimana:

$\lambda = (1 - \delta)$

δ = koefisien penyesuaian

$\alpha_0 = \delta\beta_0$; konstanta jangka pendek

$\alpha_1 \dots \alpha_4 = \delta\beta_1 \dots \delta\beta_4$; koefisien regresi jangka pendek

$\nu = \delta\varepsilon$; error term jangka pendek

Model ekonometrik di atas merupakan modifikasi dari beberapa model, variabel upah minimum diambil dari model Pratama *et al.* (2020), variabel PDB diambil dari model Taufan & Mafruhah (2022), variabel inflasi diambil dari model Sholikhah & Utomo (2023), variabel *open* diambil dari model Sahrul *et al.* (2023), variabel investasi diambil dari model Afrizal (2024), variabel pengeluaran pemerintah diambil dari model Suwardi *et al.* (2021). PDB, *Open*, dan Pengeluaran pemerintah diduga memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan Upah minimum, Inflasi dan investasi diduga memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1995 – 2023, diperoleh dari beberapa sumber yakni World Bank, Data yang digunakan meliputi upah minimum, PDB, inflasi, *Open*, Inflasi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja.

Tahap estimasi model ekonometrik di muka akan meliputi: tahap estimasi parameter model ekonometrik; uji asumsi klasik, yang meliputi uji Multikolinieritas, Uji Normalitas Residual, Uji Otokorelasi, Uji Heterokedstisitas, dan Uji Linieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapny terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik

$$\begin{aligned}
 EMP_t = & -20,7676 - 1,0840 \ln(WAGE_t) + 4,1445 \ln(PDB_t) \\
 & - 0,0006 \ln(INF_t) \\
 & \quad (0,0296) ** \quad (0,0235) ** \quad (0,9720) *** \\
 & + 0,0093 \ln(OPEN_t) - 0,2255 \ln(INV_t) - 2,1553 \ln(GOV_t) \\
 & + 0,5000 EMP_{t-1} \\
 & \quad (0,7196) *** \quad (0,0815) *** \quad (0,1905) *** \quad (0,0029) *
 \end{aligned}$$

$R^2 = 0,6498$; DW-Stat. = 1,8209; F-Stat. = 5,3025; Prob. F-Stat. = 0,0015

Uji Diagnosis

(1) Multikolinieritas (VIF)

$\ln(WAGE) = 12,4633$; $\ln(PDB) = 134,4687$; $\ln(INF) = 3,0852$; $\ln(OPEN) = 8,1202$;
 $\ln(INV) = 2,2674$; $\ln(GOV) = 155,7284$; $ROE_{t-1} = 1,2318$

(2) Normalitas Residual

JB(2) = 0,6092; Prob. JB(2) = 0,7373

(3) Otokorelasi

$\chi^2(3) = 3,9002$; Prob. $\chi^2(3) = 0,2724$

(4) Heteroskedastisitas

$\chi^2(20) = 10,9197$; Prob. $\chi^2(20) = 0,6923$

(5) Linieritas

F(2,21) = 1,1310; Prob. F(2,14) = 0,3009

Sumber: World Bank, diolah. **Keterangan:** * Signifikan pada $\alpha = 0,01$; ** Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (*p value*) t-statistik.

Koefisien regresi EMP_{t-1} (λ), terlihat sebesar 0,5000 dengan nilai *p* atau probabilitas (signifikansi) empirik statistic *t* 0,0029 ($< 0,05$), artinya koefisien *adjustment* (δ) akan memenuhi syarat $0 < \delta < 1$ dan signifikansi. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model PAM, yang dapat mempresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka panjang antara variabel dependen dan variabel independen, yang dipilih untuk menyesuaikan model ekonometrik dalam penelitian ini.

Berdasarkan definisi parameter jangka pendek, dari perhitungan diperoleh model terestimasi jangka panjang PAM sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 EMP_t^* = & -41,5352 - 2,1680 \ln(EMP_t) \\
 & + 8,2890 \ln(PDB_t) \\
 & - 0,0012 \ln(INF_t) \\
 & + 0,0186 \ln(OPEN_t) \\
 & - 0,4510 \ln(INV_t) \\
 & - 4,3106 \ln(GOV_t)
 \end{aligned}$$

Dengan waktu penyesuaian atau *adjustment time*-nya adalah:

$$AT = \frac{1}{0,5000} = 2 \text{ Tahun}$$

Dari uji diagnosis pada Tabel 1, terlihat probabilitas empirik uji Normalitas Residual, uji Otokorelasi, uji Heteroskedastisitas, dan uji Linieritas, masing-masing bernilai 0,7373 ($> 0,10$), 0,2724 ($> 0,10$), 0,6923 ($> 0,10$), 0,3009 ($> 0,10$) menunjukkan bahwa model terestimasi memiliki distribusi residual yang normal, bebas dari masalah otokorelasi dan heteroskedastisitas, dengan spesifikasi model tepat (linier). Pada variabel Inflasi, Keterbukaan, dan Investasi nilai *VIF* < 10 , sedangkan pada variabel Upah Minimum, PDB, dan Pengeluaran Pemerintah nilai *VIF* > 10 , yakni 12,4633, 134,4687, dan 155,7284, yang berarti variabel tersebut menyebabkan terjadinya masalah multikolinieritas dalam model.

Statistik kebaikan suai (*goodness of fit*) memperlihatkan bahwa model

eksis, terlihat dari nilai probabilitas empirik statistik F , yang sebesar 0,0015 ($< 0,01$), dengan R^2 atau daya ramal sedang, yakni sebesar 0,6498. Artinya, Upah minimum, PDB, Inflasi, keterbukaan, Investasi, dan Pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan 66,98 persen variasi atau naik turunnya variabel *Employment*. Secara terpisah, variabel yang secara signifikan mempengaruhi *Employment* adalah upah minimum, PDB, dan investasi, dengan probabilitas empirik statistik t sebesar 0,0296 ($< 0,05$), 0,0235 ($< 0,05$) dan 0,0815 ($< 0,10$). Variabel inflasi, keterbukaan, dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas empirik statistic t sebesar 0,9720 ($> 0,10$), 0,7196 ($> 0,10$), dan 0,1905 ($> 0,10$).

Upah minimum memiliki koefisien regresi jangka pendek sebesar -1,0840 dan koefisien regresi jangka panjangnya -2,1680, dengan pola pengaruh linier-logaritma (lin-log). Artinya, jika Upah Minimum naik 1 persen *Employment* akan turun sebesar $1,0840/100 = 0,0108$ dalam jangka pendek, dan sebesar $-2,1680/100 = 0,2168$ dalam jangka panjang. Sebaliknya jika Upah Minimum turun 1 persen, maka *Employment* akan naik sebesar 0,0108 dalam jangka pendek, dan sebesar 0,2168 dalam jangka panjang. Pada jangka pendek PDB memiliki koefisien regresi sebesar 4,1445, dan pada jangka panjang 8,2890, dengan pola pengaruh linier-logaritma (lin-log). Jika PDB naik 1 persen pada jangka pendek, *Employment* akan naik sebesar $4,1445/100 = 0,0414$, pada jangka panjang akan naik sebesar $8,2890/100 = 0,0828$. Sebaliknya, jika pada jangka pendek PDB turun 1 persen, *Employment* akan turun sebesar 0,0414, pada jangka panjang akan turun 0,0828.

Koefisien regresi jangka pendek pada Inflasi bernilai -0,0006, koefisien

regresi jangka panjangnya -0,0012, dengan pola pengaruh linier-linier (lin-lin). Dalam jangka pendek, jika inflasi naik 1 persen, *Employment* akan turun sebesar 0,0006, dalam jangka panjang akan turun 0,0012. Sebaliknya, jika Inflasi turun 1 persen, dalam jangka pendek *Employment* akan naik 0,0006, dalam jangka panjang akan naik 0,0012. Keterbukaan memiliki koefisien regresi jangka pendek sebesar 0,0093 dan koefisien regresi jangka panjang 0,0186, dengan pola pengaruh linier-linier (lin-lin). Artinya jika Keterbukaan naik 1 persen *Employment* akan naik sebesar 0,0093 dalam jangka pendek, dan sebesar 0,0186 pada jangka panjang. Sebaliknya jika Keterbukaan turun 1 persen, maka *Employment* akan turun 0,0093 dalam jangka pendek, dan sebesar 0,0186 pada jangka panjang.

Pada jangka pendek Investasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,2255, dan pada jangka panjang -0,4510, dengan pola pengaruh linier-linier (lin-lin). Jika Investasi naik 1 persen *Employment* akan turun sebesar 0,2255, pada jangka panjang akan turun sebesar 0,4510. Sebaliknya, jika pada jangka pendek Investasi turun 1 persen, maka *Employment* akan naik sebesar 0,2255, pada jangka panjang akan naik 0,4510. Koefisien regresi jangka pendek pada Pengeluaran Pemerintah bernilai -2,1553, koefisien regresi jangka panjangnya -4,3106, dengan pola pengaruh linier-logaritma (lin-log). Dalam jangka pendek, jika Pengeluaran Pemerintah naik 1 persen, *Employment* akan turun $2,1553/100 = 0,0215$, dalam jangka panjang akan turun $4,3106/100 = 0,0431$. Sebaliknya jika Pengeluaran Pemerintah turun 1 persen, dalam jangka pendek *Employment* akan naik 0,0215, dalam jangka panjang akan naik 0,0431. Sesuai dengan waktu penyesuaian atau *adjustment time*-nya yang 2 tahun, efek panjang Upah Minimum, PDB, Inflasi,

Keterbukaan, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Employment baru akan tercapai dalam waktu 2 tahun.

Interpretasi Ekonomi

Selama periode tahun 1995-2023 penyerapan tenaga kerja di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh variabel Produk Domestik Bruto dan Keterbukaan Ekonomi sedangkan variabel Upah Minimum, Inflasi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, jika Upah minimum naik maka Penyerapan Tenaga Kerja akan turun. Upah Minimum yang lebih tinggi meningkatkan biaya bagi pengusaha, yang dapat mendorong mereka untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, atau bahkan menutup usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Kenaikan Upah minimum secara teoritis mempengaruhi biaya produksi perusahaan, oleh karena itu kenaikan upah menyebabkan perusahaan menekan biaya produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang.

Pengaruh PDB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Peningkatan PDB umumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, yang kemudian mendorong peningkatan lapangan kerja

karena perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufan & Mafruhut (2022) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Adanya permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja).

Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, jika Inflasi naik maka Penyerapan Tenaga Kerja akan turun. Ketika Inflasi naik, daya beli masyarakat menurun dan biaya operasional perusahaan meningkat, yang mendorong perusahaan untuk menekan pengeluaran termasuk mengurangi perekrutan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja ikut menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Sholikhah & Utomo (2023) yang menunjukkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya biaya produksi maka harga produk-produk juga ikut naik. Biaya produksi yang tinggi membuat para produsen akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan berarti jumlah penyerapan tenaga kerja akan berkurang.

Pengaruh Keterbukaan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Keterbukaan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan adanya peningkatan Keterbukaan Ekonomi dapat mendorong masuknya investasi asing, ekspor, dan pertumbuhan sektor-sektor produktif

yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul *et al.* (2023) menyatakan bahwa keterbukaan ekonomi berpengaruh positif. Ketika ekonomi lebih terbuka, perusahaan memiliki akses yang lebih luas ke pasar, investasi, dan teknologi, yang semuanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan tenaga kerja.

Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, jika Investasi naik maka Penyerapan Tenaga Kerja akan turun. Ketika Investasi naik namun difokuskan pada sektor padat modal atau penggunaan teknologi otomatisasi yang tinggi daripada sektor padat karya, maka peningkatan kapasitas produksi tidak secara langsung diiringi dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja justru dapat menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Afrizal, (2024) menyatakan bahwa Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi seringkali diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Teknologi ini dapat menggantikan peran tenaga kerja manusia, sehingga menyebabkan penurunan kebutuhan akan tenaga kerja.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, jika Pengeluaran Pemerintah naik maka Penyerapan Tenaga Kerja turun.

Meskipun Pengeluaran Pemerintah meningkat, jika alokasinya tidak diarahkan pada sektor-sektor yang padat karya melainkan lebih banyak pada sektor non-produktif seperti birokrasi dan pembayaran utang atau subsidi yang tidak langsung menciptakan lapangan kerja, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa minim atau bahkan menurun. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suwardi *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah maka akan semakin rendah penyerapan tenaga kerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode 1995-2023 dipengaruhi secara positif oleh Produk Domestik Bruto dan Keterbukaan ekonomi dan secara negatif dipengaruhi oleh Upah Minimum, Inflasi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah. Upah Minimum belum efektif dalam menambah tingkat penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum yang lebih tinggi meningkatkan biaya bagi pengusaha, yang dapat mendorong mereka untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, Peningkatan PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, yang kemudian mendorong peningkatan lapangan kerja karena perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, Ketika Inflasi naik, daya beli masyarakat menurun dan biaya operasional perusahaan meningkat, yang mendorong

perusahaan untuk menekan pengeluaran termasuk mengurangi perekrutan tenaga kerja. Keterbukaan Ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini, karena ketika ekonomi lebih terbuka, perusahaan memiliki akses yang lebih luas ke pasar, investasi, dan teknologi, yang semuanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan tenaga kerja. Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, Ketika Investasi naik namun difokuskan pada sektor padat modal daripada sektor padat karya, maka peningkatan kapasitas produksi tidak secara langsung diiringi dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja justru dapat menurun. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, jika pengeluaran pemerintah lebih banyak digunakan untuk teknologi otomatisasi atau impor barang, maka kebutuhan akan tenaga kerja domestik bisa berkurang sehingga penyerapan tenaga kerja turun.

Pemerintah perlu menetapkan upah minimum dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi agar daya beli masyarakat tetap seimbang tanpa memberatkan pelaku usaha. Selain itu, Pengeluaran pemerintah harus dialokasikan secara tepat sasaran dan efisien untuk mendukung program-program yang mampu memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, kombinasi kebijakan ini dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil sekaligus mendorong pertumbuhan tenaga kerja yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel baru yang relevan. Selain itu penelitian dengan topik ini dapat dilakukan di negara lain, sehingga bisa didapatkan kesimpulan yang lebih kuat terkait faktor-faktor yang

memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Hafiludina, Idah Zuhroh, F. A. A. (2024). *Jurnal Ilmu Ekonomi. Jurnal Ilmu Ekonomi*, 08(03), 282–293.
- Bassanini, A., & Venn, D. (2016). The role of human capital in labor market outcomes. *OECD Economic Studies*, 1, 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/eco_studies-2016-5jrs1htg2lmz
- Borjas, G. J. (2015). *Labor economics. McGraw-Hill Education.*
- Freeman, R. B. (2007). *Labor market institutions around the world. NBER Working Paper.*
- Hasanah, U. (2021). the Effect of Investment, Unemployment, Minimum Wages on Labor Absorption in West Java Province 2008-2020. *International Journal of Economics, Business and Accounting Reseach (IJEBA)*, 5(2), 505–518.
- Iksan, S. A. N., Arifin, Z., & Suliswanto, M. S. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 42–55. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.9482>
- Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(8), 923–950. <https://www.neliti.com/publications/44563/pengaruh-inflasi-pdrb-dan-upah-minimum-terhadap-penyerapan-tenaga-kerja-di-provi>
- Jamaliah. (2016). The Effect of Investment to Value Added Production, Employment

- Absorption, Productivity, and Employees' Economic Welfare in Manufacturing Industry Sector in West Kalimantan Province. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 387–393. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.060>
- M. Fathul Riyan Afrizal, M. I. H. (2024). Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9257–9268. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8466>
- Mankiw, N. G. (2016). Cengage Learning. *Macroeconomics*, 9.
- Meilawati, R., & Indira Hasmarini, M. (2023). SEIKO: Journal of Management & Business Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 146–153. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3551>
- Nidya Listiyono, Adi Wijaya, I. T. (2021). The effect of investment, education level, and government spending on economic growth and labor absorption in East Kalimantan Province, Indonesia. *Technium social sciences journal*, 20(June), 465–485.
- Pratama, R. P., Muhammad, S., & Silvia, V. (2020). Do Minimum Wage and Economic Growth Matter for Labor Absorption in Sumatra Island, Indonesia? *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.36349/EASJEBM.2020.v03i01.07>
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 220. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05>
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Ramdani, A. N., Supadi, & Kadarwati, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 23(2), 16–31. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1833>
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. W.W. Norton & Company.
- Sahrul, S., Metekhoy, S., Pattilouw, D. R., & Sangadji, M. (2023). Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1993-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1785–1799. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1242>
- Sang Ketut Ari Ardiawan, & Made Suyana Utama. (2024). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(1), 172–198.

- <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i1.5133>
- Sari, Yetti Anita, khaerunisa, ramlah. (2023). Analisis Spasial dan Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 7(2), 251–262.
<https://doi.org/10.29408/geodika.v7i2.21366>
- Sholikhah, I., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb Sektor Pertanian, Pdrb Sektor Industri, Pdrb Sektor Jasa Dan Upah Minimum Kabupaten (Umk) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2002-2020. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 446–454.
- Suwardi, W. Z., Hasanuddin, B., Anwar, A. I., & Zamhuri, M. Y. (2021). *The Influence of Government Expenditures on Labor Absorption in Indonesia in 2010-2019*. 6(6), 1116–1120.
- Taufan, N. K., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 415–422.
<https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3974>
- Wilis, R. (2016). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan. *El Dinar*, 3(1), 12–26.
<https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3335>